

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Chidir, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT.Eresco, Bandung
- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Brotodiharjo, Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung
- Dewanto, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, FH UMY Press, Yogyakarta
- Gustia, Marlon, 2006, *Penerapan Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*, Jurnal IUS Vol IV Nomor 1. Jakarta.
- Hutomo, Y.B. Sigit, 2013, *Pajak Penghasilan (Konsep dan Aplikasi)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Irianto, Edi Slamet dan Syarifuddin Jurdi, 2005, *Politik Perpajakan; Membangun Demokrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
- Mansury, R, 1999, *Kebijakan Fiskal*, YP4, Jakarta
- Mardiasmo, 2004, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nurmanu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Prakosa, Kesit Bambang, 2003, *Hukum Pajak*, Ekonisa, Yogyakarta
- Pudyatmoko, Sri, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Setiawan, 2010, *Hukum Perpajakan Teori dan Praktik*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 2004, *Kompilasi Peraturan Di Bidang BPHTB, Panduan Dalam Penyusunan Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

_____, 2010, *Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

_____, dan Sri Mammudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta

Soemitro, Rahmat, 1987, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1987.

Soemitro, Rahmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Refika Aditama, Bandung

_____, 2010, *Asas-Asas dan Dasar Perpajakan*, Grafika Aditama, Bandung.

Suandy, Erly, 2009, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta

Sumardjono, Maria.S.W, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sumyar, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum : Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Supramono dan Theresia Woro D, 2005, *Perpajakan Indonesia ;Mekanisme dan Perhitungan*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Sutedi, Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2008, *Hukum Perpajakan dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jendral Pajak, 2016, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tertinggi*, Jakarta

Wahjono, Padmo, 1984, *Undang-Undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2*, Salemba Empat, Jakarta.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terjemahan R.Subekti dan Tjitrosudibio

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 22 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

C. Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>, diakses pada tanggal 11 September 2020.

D. Jurnal/Penelitian/Artikel

Herlandia, Dhennia Audri 2019, “Praktik Penetapan Besaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terutang Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum di Bidang Perpajakan”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman.

Nugroho, Sulung, 2017, “Penelitian/Verifikasi Lapangan Pembayaran BPHTB Oleh Badan Pendapatan Daerah Yang Berbeda Dengan Harga Transaksi Jual Beli Tanah”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Pertiwiningsih, 2018, “Penerapan Saat Terutangnya Bea Perolehan Gak Atas Tanah dan Bangunan”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman.

Sulastri L, Linda, 2017, “Pembayaran BPHTB Atas Warisan Yang Berasal Dari Harta Persatuan di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman.

Wungsu, Gede Kurnia Utara, 2017, “Akibat Hukum Pembayaran Pajak Penghasilan Sebelum Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dihadapan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman.

Yulvan, H. Edral, 2008, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rangka Mengawasi dan Mengamankan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.